



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Agus Harimurti Yudhoyono

Jakarta, 30 Januari 2026

PIHAK PERTAMA,


Ayodhia G. L. Kalake


LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	86
		IKSP.1.2	Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Menengah (0,61 – 0,8)
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3,3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	94
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Sangat Baik (A-)
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	AA
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Indeks Pemerintah Digital	3
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	AA (86 – 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (90 – 100)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi, dan Kerja Sama	Rp4.354.803.000,00
2	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Rp6.043.920.000,00
3	Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Rp3.450.071.000,00
4	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran, Keuangan, Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp149.349.371.000,00
JUMLAH ANGGARAN*)		Rp163.198.165.000,00

*) Jumlah Anggaran Efektif Adalah Jumlah Anggaran Total Dikurangi Anggaran RO Khusus.

Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan


Agus Harimurti Yudhoyono

Jakarta, 30 Januari 2026
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan


Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
IKSP.1.1	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB terhadap Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan				✓
IKSP.1.2	Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN berdasarkan aspek perencanaan kebutuhan dan standarisasi jabatan; manajemen talenta; pengelolaan kinerja; pengembangan kompetensi; penguatan budaya kerja dan citra institusi; penghargaan dan pengakuan; disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif; digitalisasi manajemen ASN.				✓
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			✓	
IKSP.1.4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Mencapai Tujuan Pengendalian				✓
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Capaian Kinerja atas Penggunaan Anggaran Kementerian yang Tertuang dalam Dokumen Anggaran				✓
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.				✓
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum (Kemenhum) untuk mengukur reformasi hukum. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.				✓
IKSP.2.1	Indeks Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Kementerian PANRB terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Cakupan Evaluasi meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.				✓
IKSP.2.2	Nilai JDIIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kementerian Hukum (Kemenhum) dalam menilai Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional.				✓
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.				✓

Jakarta, 30 Januari 2026
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Ayodhia G. L. Kalake

MATRIKS DUKUNGAN PENCAPAIAN KINERJA MENKO TAHUN 2026
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI
Tujuan 1: Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia	21,6%	-	-	-	-	-
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	57,7%	-	-	-	-	-
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100% 3,2	-	-	-	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	92	Direct	Tenajudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Nilai Kinerja Anggaran Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Hukum	86 Menengah (0,61-0,8) WTP 3,3 94 Sangat Baik (A-) AA	Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan

LEVEL MENKO			LEVEL ESELON I				
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI
				Tenwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	Indeks Pemerintah Digital	3	Tahunan
					Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	AA (86 – 100)	Tahunan
					Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (90 – 100)	Tahunan

Jakarta, 30 Januari 2026
 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
 Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan


 Ayodhia G. L. Kalake